

AKUNTABILITAS PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA, FILSAFAT, PSIKOLOGI, DAN SOSIOLOGI

Khoirul Anwar

Universitas Islam Nusantara Bandung

E-mail: khoirulanwaro529@gmail.com

Iman Saifullah

Universitas Islam Nusantara Bandung

E-mail: imansaifullah@uniga.ac.id

Muhammad Al Mighwar

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: malmighwar@gmail.com

Ujang Nurjaman

Universitas Islam Nusantara Bandung

E-mail: ujangn61@gmail.com

Received	Revised	Accepted
16 Desember 2021	4 January 2022	18 January 2022

EDUCATION ACCOUNTABILITY BASED ON RELIGION, PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY, AND SOCIOLOGY

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the what, why, and how of education accountability based on religion, philosophy, psychology, and sociology. The results of this study are that the education accountability: (1) based on religion is a spiritual responsibility to God as a result of an educational act, which should be done fairly, ihsan, satisfactorily, not cheating, not violating the rules, and not contradicting; (2) based on philosophy is intellectual accountability to the rules of logical thinking as a result of an educational act, which should be carried out by means of essential, perennial, pragmatic and progressive, and reconstructional thinking; (3) based on psychology is an emotional responsibility to a sense of humanity as a result of an educational act, which should be done by considering aspects of the nature, behavior, and the right situation around it; and (4) based on sociology is social responsibility to the position of society as a result of an educational act, which should be done by fulfilling the functional needs of the community, both political stratification, economy and social status.

Keywords: *EducationAccountability; Religion; Philosophy; Psychology; Sociology*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa, mengapa, dan bagaimana akuntabilitas pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi. Hasil penelitian ini adalah bahwa akuntabilitas pendidikan pendidikan: (1) berbasis agama adalah pertanggungjawaban spiritual kepada Tuhan akibat suatu perbuatan edukasi, yang mestinya dilakukan secara adil, ihsan, memuaskan, tidak curang, tidak melanggar aturan, dan tidak bertentangan; (2) berbasis filsafat adalah pertanggungjawaban intelektual kepada kaidah pemikiran logis akibat suatu perbuatan edukasi, yang mestinya dilakukan dengan cara berpikir esensial, perennial, pragmatis dan progresif, dan rekonstruksional; (3) berbasis psikologi adalah pertanggungjawaban emosional kepada rasa kemanusiaan akibat suatu perbuatan edukasi, yang mestinya dilakukan dengan cara mempertimbangkan aspek sifat, perilaku, dan situasi yang tepat di sekelilingnya; dan (4) berbasis sosiologi adalah pertanggungjawaban sosial kepada posisi masyarakat akibat suatu perbuatan edukasi, yang mestinya dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan fungsional masyarakat, baik stratifikasi politik, ekonomi maupun status sosial.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Pendidikan; Agama; Filsafat; Psikologi, Sosiologi*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas Pendidikan menjadi poin keempat dari lima poin misi pendidikan nasional yang termaktub dalam Penjelasan angka 1 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi “...pendidikan nasional mempunyai misi meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global”.

Misi peningkatan akuntabilitas pendidikan tersebut diamanatkan UU 20/2003 sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Oleh karena itu, pasal 35 UU 20/2003 menyatakan bahwa akuntabilitas pendidikan wajib ditingkatkan secara berencana dan berkala yang mencakup delapan Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Misi peningkatan akuntabilitas pendidikan tersebut ternyata seiring sejalan dengan gencarnya tuntutan masyarakat akan pendidikan yang bermutu, efisien, adil, dan terbuka. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat pada masa kini lebih kritis dan proaktif dibanding dengan masyarakat masa lalu yang cenderung pasif/nrimo.¹

¹ Jalal Fasli & Dedi Supriyadi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: AdiCita, 2001: 33).

Masyarakat masa kini memandang bahwa dengan ikut serta membayar biaya pendidikan (*cost of education*), baik secara langsung melalui iuran pendidikan (*education fee*) maupun secara tidak langsung melalui pajak rakyat (*people's tax*), maka mereka pun merasa berhak “menagih” akuntabilitas/pertanggungjawaban lembaga/instansi pendidikan tentang kembalian pendidikan (*output and outcome*) yang bermutu bagi dirinya, anak-anaknya, dan masyarakat pada umumnya.

Salah satu bentuk akuntabilitas pendidikan yang diamanatkan dalam BAB XVI UU 20/2003 dan sedang dijalankan oleh Pemerintah dan masyarakat adalah evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Dengan tiga bentuk akuntabilitas pendidikan beserta berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang menaunginya diharapkan tercapai *good practice of education* yang mampu memenuhi bahkan dapat melampaui delapan SNP. Untuk maksud ini, Pemerintah telah menetapkan persyaratan yang ketat dan membentuk lembaga independen untuk melaksanakannya, misalnya adanya Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan BAN-SM (Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah) untuk akreditasi sekolah/madrasah serta BAN-PT/LAM (Badan Akreditasi Perguruan Tinggi/Lembaga Akreditasi Mandiri) untuk akreditasi Perguruan Tinggi sebagai wujud akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Progres dan hasil akuntabilitas pun dipublish secara transparan di media sosial berbasis digital, baik di situs BAN-SM/BAN-PT/LAM maupun situs-situs instansi pemerintah dan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Dengan adanya tiga bentuk akuntabilitas pendidikan berbasis digital tersebut, masyarakat dapat dengan mudah dan murah (efisien) ikut serta melakukan *quality control* dan mengetahui kualitas kinerja atau mutu suatu lembaga pendidikan serta instansi pemerintah yang menaunginya; apakah sudah MELAMPAUI SNP dengan peringkat akreditasi Unggul (A), baru MEMENUHI SNP dengan peringkat akreditasi Sangat Baik (B) dan BAIK/CUKUP (C), atau belum terakreditasi sama sekali. Peringkat akreditasi ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat (*public trust*); apakah tetap bertahan di lembaga/instansi pendidikan yang bersangkutan bahkan ikut serta semangat membantunya, atau malah “pindah ke lain hati” bahkan malah menuntut “ganti rugi”.

Merespon kebijakan Pemerintah terkait kewajiban akuntabilitas pendidikan dalam bentuk akreditasi tersebut, berbagai lembaga pendidikan di Indonesia, dari mulai jenjang PAUD/TK/RA, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah sampai Pendidikan Tinggi giat melakukan perbaikan dan peningkatan mutunya sesuai SNP, dan hasil peringkat akreditasinya pun beragam. Misalnya, untuk akreditasi jenjang Pendidikan Tinggi, penelitian Muhammad Al Mighwar dalam Journal Al Afkar menemukan bahwa menurut data BAN-PT rata-rata Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia sudah diakreditasi (baik prodi maupun PT), meskipun masih ada yang belum terakreditasi/*on process*, dan peringkat akreditasi PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) ternyata masih lebih baik dibandingkan PTKIS (Perguruan

Tinggi Keagamaan Islam Swasta), tetapi masih jauh di bawah PTN (Perguruan Tinggi Negeri).²

Data BAN-PT tersebut di satu sisi sangat menggembirakan karena mengindikasikan adanya komitmen PT untuk melakukan akuntabilitas pendidikan melalui akreditasi secara berkelanjutan sebagai bukti jaminan mutunya kepada publik, tetapi di sisi lain muncul fenomena/masalah krusial, antara lain: (1) peringkat akreditasi sebagian PT ada yang stagnan saat reakreditasi (akreditasi ulang) bahkan ada juga yang turun; dan (2) akreditasi yang dilakukan sebagian PT terindikasi “instan” bahkan “semu” dalam arti *report*-nya disusun “dadakan” menjelang tibanya limit waktu akreditasi dengan data yang cenderung “manipulatif”, bukan *true report* dari *daily real of internal quality assurance*, baik dari segi penyelenggaraan pendidikan maupun managemennya.

Dua fenomena/masalah tersebut diperkuat oleh KPK tentang Tata Kelola Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) tahun 2018, yang menemukan empat permasalahan umum pada 179 PTKL di 20 Kementerian/Lembaga, yaitu: (1) Regulasi: penyelenggaraan PTKL tidak sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Kelembagaan: Kelembagaan PTKL tidak jelas; lambatnya stakeholders menindaklanjuti perubahan kebijakan pemerintah terhadap PT Kesda; (3) Tata Kelola: monitoring dan pembinaan akademik dan nonakademik tidak dilakukan secara terstruktur; tidak jelasnya definisi anggaran pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan PTKL; dan (4) Belum sinkronnya kebutuhan industri dengan luaran/output PTKL; permasalahan kualifikasi tenaga pendidik PTK.³

Sementara itu, harapan masyarakat lokal, nasional, bahkan internasional terhadap pendidikan yang bermutu dan akuntabel sangatlah besar. Sebagai indikatornya dapat diketahui dari sifat-sifat para pengelola/pemimpin pendidikan yang diharapkan mampu memberikan jaminan mutu dan akuntabilitas, sebagaimana tercermin dari hasil penelitian Kouzes & Posner selama 20 tahun (1987-2007) dengan responden 200.000 *leader* di berbagai organisasi, yang menemukan ranking sifat pemimpin harapan, yaitu: (1) jujur; (2) pandangan jauh ke depan; (3) memberi inspirasi; (4) cakap; (5) adil; (6) mau memberikan dukungan; (7) berpikiran luas; (8) cerdas; (9) lugas; (10) dapat diandalkan; (11) berani; (12) mau bekerja sama; (13) punya imajinasi; (14) peduli; (15) bertekad kuat; (16) dewasa; (17) ambisius; (18) setia; (19) mampu mengendalikan diri; dan (20) mandiri.⁴

Lalu mengapa masalah-masalah akuntabilitas pendidikan itu masih terjadi, padahal regulasi Pemerintah dengan segala persyaratan dan pengawasan serta lembaga auditnya sudah cukup jelas dan harapan masyarakat akan Pendidikan yang bermutu dan akuntabel juga sangat tinggi? Mengapa? Asumsinya adalah masih adanya persepsi di kalangan penyelenggara dan pengelola lembaga pendidikan bahwa

² Muhammad Al Mighwar, “Penyusunan Dan Penyesuaian Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)”, *Jurnal Al Afkar*, Vol. 4, No. 1, Februari 2021: 33-34. Tersedia online: https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/157

³ *Op.cit.*: 34.

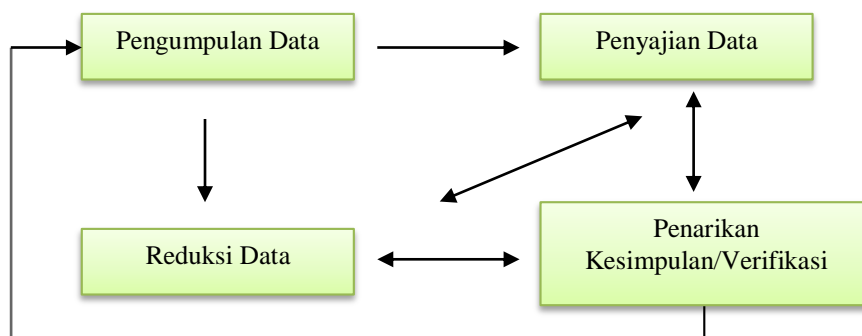
⁴ J.M. Kouzes, J.M. dan B.Z. Posner, *The Leadership Challenge*. San Francisco: Jossey-Bass Publishing, 2010).

akuntabilitas pendidikan baru sebatas “*external-formal accountability*” berbasis regulasi/aturan Pemerintah, belum betul-betul disadari dan dipahami betul sebagai “*internal-self accountability*” berbasis regulasi/aturan yang lebih fundamental yang dianutnya dan menuntutnya sebagai insan yang bertuhan, berakal, berperasaan, dan bermasyarakat. Basis aturan yang dimaksud adalah kaidah agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi.

Memperhatikan fenomena/masalah di atas, sebagai tawaran alternatif solusi, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa (*what*), mengapa (*why*), dan bagaimana (*how*) sesungguhnya akuntabilitas pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dengan teknik *library research*,⁵ data dianalisis dengan paradigma analisis Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi⁶ yang berkaitan dengan akuntabilitas pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi. Proses keempat teknis analisis data ini tampak pada gambar berikut.



Gambar 1. Proses Analisis Data Miles dan Huberman

PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pendidikan

Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata ‘akuntabilitas’ adalah “perihal bertanggung jawab; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban”,⁷ dan pertanggungjawaban itu sendiri berasal dari kata tanggung jawab yang berarti “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan; menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain”,⁸ sedangkan dalam bahasa Inggris disebut

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2002: 198).

⁶ B.B. Miles dan A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: UI Press, 1992): 17; Muhammad Al Mighwar, “The Leadership of K.H. Imam Zarkasyi in Managing of Boarding School Darussalam Gontor”, *IJO - International Journal Of Educational Research*, Volume 4| Issue 03| March | 2021: 16 . Tersedia online: <http://www.ijojournals.com/index.php/er/article/view/450>

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabilitas>

⁸ <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>

accountability dimana *The Cambridge English Dictionary* mengartikannya dengan “*the fact of being responsible for what you do and able to give a satisfactory reason for it, or the degree to which this happens*”.⁹ Sedangkan kata ‘pendidikan’ berasal dari kata didik dimana KBBI mengartikannya dengan “proses, cara, perbuatan mendidik; proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan,” dan dalam bahasa Inggris disebut ‘*education*’ dimana *The Cambridge English Dictionary* mengartikannya dengan “*the process of teaching or learning, especially in a school or college, or the knowledge that you get from this*”.¹⁰ Singkatnya, akuntabilitas pendidikan adalah pertanggungjawaban proses perbuatan mendidik/edukasi.

Terminologi akuntabilitas termasuk bidang pendidikan dalam konteks Indonesia, dengan merujuk pada Deklarasi Tokyo 1985 tentang Petunjuk Akuntabilitas Publik dan pendapat para pakar *management* seperti J.B. Gharthey dan Samuel Paul, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas ini ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana.¹¹

Merujuk pada pandangan para pakar seperti Sirajudin H. Saleh dan Ahsan Iqbal, LAN juga menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia, yang meliputi dua hal: (1) Akuntabilitas intern seseorang, yaitu pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhannya, yang dalam istilah Ledivina V. Carino disebut akuntabilitas spiritual; dan (2) Akuntabilitas ekstern seseorang, yaitu akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya, baik lingkungan formal (atasan-bawahan) atau *internal accountability to the public servant's own organization*, maupun lingkungan masyarakat atau *external accountability to the individuals and organization outside public servant's own organization*.¹²

Dalam konteks pendidikan khususnya, menurut Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, akuntabilitas pendidikan meliputi tiga, yaitu: (1) Akuntabilitas keberhasilan, dimulai dengan penetapan tujuan-tujuan yang spesifik. Dalam konteks ini, usaha pendidikan diorientasikan untuk menutup jurang antara keadaan awal peserta didik dengan kondisi akhir yang diharapkan sebagaimana yang menjadi tujuan yang spesifiknya. Jenis akuntabilitas ini, menilai keberhasilan pengajaran dengan cara langsung mengukur keadaan siswa atau peserta didiknya; (2) Akuntabilitas profesional mengacu pada sejauh mana standar praktis tentang sikap, keterampilan, dan teknik-teknik yang telah teruji secara sah dan handal dipakai

⁹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accountability>

¹⁰ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/education>

¹¹ Lembaga Administrasi Negara, *Perencanaan Strategic Instansi Pemerintah* (Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, 2000: 21-23).

¹² *Op.cit.*: 24, 26.

dalam meyakini hasil yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, akuntabilitas profesional ini berkaitan dengan akuntabilitas keberhasilan karena mengingat dengan keahlian yang profesional tersebut, guru bekerja mengusahakan keberhasilan siswa; dan (3) Akuntabilitas sistem dimana sistem pendidikan hendaknya akuntabel dalam mewujudkan janji-janjinya kepada masyarakat sebagai imbalan dari berbagai kemudahan (fasilitas) yang telah diberikan kepada masyarakat. Dalam aplikasi akuntabilitas yang berkaitan dengan dirinya sendiri, suatu sistem harus mampu mengukur pencapaian siswa, serta menghubungkan hasil pengukuran itu dengan tujuan, harapan masyarakat, dengan *resources* yang tersedia, dan dengan cara-cara keahlian profesional yang telah dipraktekkan.¹³

Sebagai *alternative opinion* dari terminologi akuntabilitas termasuk bidang pendidikan di Indonesia yang berpedoman pada pandangan para ahli dan Pemeritnah tersebut, deskripsi dan analisis yang berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi sangatlah urgen dilakukan. Sebab, agama terkait erat dengan akuntabilitas spiritual, filsafat terkait erat dengan akuntabilitas pemikiran, psikologi terkait erat dengan akuntabilitas kejiwaan/emosional, dan sosiologi terkait erat dengan akuntabilitas sosial dimana keempatnya harus menjadi basis pertimbangan utama dan utuh, sebagaimana uraian berikut.

Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama

Secara etimologis, menurut KBBI, kata 'berbasis' berasal dari kata dasar basis yang berarti "mempunyai basis; berdasarkan pada",¹⁴ dan dalam bahasa Inggris disebut 'based on' yang dalam *The Cambridge English Dictionary* diartikan dengan "If you base something on facts or ideas, you use those facts or ideas to develop it".¹⁵ Sedangkan kata 'agama' berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *āgama* (*aagama*) yang berarti "tradisi", dan dari bahasa Latin yaitu religi yang berasal dari kata kerja *re-ligare* yang berarti "mengikat kembali". Artinya dengan memiliki jiwa religi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.¹⁶ Dalam bahasa Inggris, agama disebut *religion* yang berarti agama, kesucian, ketelitian batin, dimana *The Cambridge English Dictionary* mengartikannya dengan "the belief in and worship of a god or gods, or any such system of belief and worship".¹⁷

Dengan demikian, akuntabilitas pendidikan berbasis agama berarti pertanggungjawaban proses perbuatan mendidik berdasarkan pada ajaran ketuhanan, terutama yang termaktub dalam ayat-ayat kitab suci yang tepat dan relevan yang mengatur hubungan manusia dengan-Nya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Dalam agama Islam, banyak ayat al-Quran yang menjadi basis akuntabilitas pendidikan, antara lain *pertama*, firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Qiyamah: 36,

¹³ Jalal Fasli dan Dedi Supriyadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita, 2001: 35).

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berbasis>

¹⁵ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/base-sth-on-sth?q=based+on>

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Portal:Agama>

¹⁷ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/religion>

“apakah manusia mengira ia dibiarkan saja tanpa pertanggungjawaban?”¹⁸ Kedua, firman-Nya dalam Q.S. Al-Isra: 36, “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya”. Ketiga, sabda Nabi Saw., “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”.¹⁹

Kedua ayat dan hadits tersebut menunjukkan secara tegas bahwa akuntabilitas/pertanggungjawaban termasuk bidang pendidikan merupakan perintah wajib/tuntutan ilahi/khalik kepada setiap makhluknya. Ia merupakan kewajiban setiap manusia kepada Tuhannya sebagai pertanggungjawaban spiritual karena sikapnya sendiri atau pihak lain yang dipimpinnya. *Any where and any time*, setiap orang harus siap untuk menerima bebanan atau menanggung segala sesuatunya, tidak hanya dalam bentuk *reward* tetapi juga *punishment* dari Tuhan seperti dituntut atau dipersalahkan.

Lalu bagaimana akuntabilitas *uluhiyah* itu dilakukan? Dalam Q.S. Al-Nahl: 90, Allah Swt. berfirman, *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*.

Berdasar ayat tersebut, akuntabilitas pendidikan dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) wajib berlaku adil/proporsional, ihsan/sempurna/melampaui standar, memenuhi kebutuhan/memuaskan *stakeholders*; dan (2) haram berlaku keji/curang, mungkar/melanggar aturan, dan bermusuhan/konflik.²⁰

Bagaimana kedua cara Islam dalam ayat tersebut diaplikasikan dalam proses akuntabilitas pendidikan berbentuk evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi di Indonesia? Para pihak yang berkepentingan seperti penyelenggara pendidikan, pimpinan pendidikan, dosen, mahasiswa, guru, siswa, pengawas, asesor, masyarakat pengguna dan pihak terkait lainnya sepakat: (1) wajib berlaku adil/ proporsional artinya objektif dalam memberikan penilaian, wajib berbuat *ihsan/sempurna/melampaui standar* artinya mampu memenuhi bahkan melampaui delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan wajib memenuhi kebutuhan/memuaskan *stakeholders* artinya mampu memenuhi harapan para pihak yang berkepentingan/tidak mengecewakan, mau dan mampu mempertanggungjawabkannya saat ada evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; dan (2) haram berlaku keji/curang artinya tidak memanipulasi data/mencontek, haram berbuat mungkar/melanggar aturan artinya patuh pada regulasi yang berlaku/tidak membuat-buat aturan semauanya sendiri, dan haram bermusuhan/konflik artinya tidak konfrontatif tetapi kooperatif/lapang dada

¹⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/75>

¹⁹ HR. Muslim.

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984: 265); Sachiko Murata dan William C.Chittick, *Trilogi Islam: Islam, Iman, dan Ihsan*, terjemah :Ghufron A, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997: 294); <https://tafsirweb.com/4438-surat-an-nahl-ayat-90.html>

menerima perbaikan, mau dan mampu mempertanggungjawabkannya saat ada evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pendidikan berbasis agama adalah pertanggungjawaban spiritual setiap orang kepada Tuhannya karena perbuatan edukasinya, yang mestinya dilakukan dengan cara yang adil, *ihsan*, memuaskan, tidak curang, tidak melanggar aturan, dan tidak bertentangan.

Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Filsafat

Secara etimologis, kata 'filsafat' berasal dari bahasa Yunani yaitu *filosofia* yang arti harfiahnya "cinta akan hikmah",²¹ sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *philosophy* yang dalam *The Cambridge English Dictionary* didefinisikan dengan "*the use of reason in understanding such things as the nature of the real world and existence, the use and limits of knowledge, and the principles of moral judgment*".²²

Dari definisi etimologis di atas dipahami bahwa akuntabilitas pendidikan berbasis filsafat adalah pertanggungjawaban proses perbuatan mendidik berasaskan pada kecintaan terhadap penggunaan dan pemahaman akal sehat, termasuk yang dihasilkan oleh para ahli filsafat yang tepat dan sesuai.

Banyak aliran filsafat yang dapat dipilih sebagai basis akuntabilitas pendidikan, antara lain aliran/paham/cara berpikir: (1) *essentialisme* yang memusatkan perhatian intelektualnya pada ide dan data-data realistik dimana pendidikan harus dipertanggungjawabkan secara ideal (sesuai ide/nilai) dan realistik (faktual/tidak manipulatif); (2) *perennialisme* yang memusatkan perhatian intelektualnya pada keabadian dimana pendidikan harus dipertanggungjawabkan secara konstan/berkelanjutan (tidak temporal/sesaat); (3) *pragmatisme* dan *progresivisme* yang memusatkan perhatian intelektualnya pada hal-hal praktis dan maju dimana pendidikan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan praktek yang sebenarnya dan demi perkembangan selanjutnya yang lebih baik; dan (4) *rekonstruksionisme* yang memusatkan perhatian intelektualnya pada tindakan rekonstruksi dimana akuntabilitas dimaksudkan untuk merekonstruksi/memperbaiki kembali mutu pendidikan yang sudah ada.²³

Empat aliran filsafat yang mendasari akuntabilitas pendidikan tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian Saidah A.H. dalam jurnal *Al Asas*, bahwa: (1) *Essensialisme* menghendaki agar landasan pendidikan berakar dari nilai-nilai yang esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun dan telah turun-temurun dari zaman ke zaman, dengan mengambil zaman Renaissance sebagai permulaan; (2) *Perennialisme* menghendaki pendidikan diarahkan pada upaya pengembangan kemampuan intelektual melalui pemberian pengetahuan yang bersifat abadi, universal, dan absolut; (3) *Pragmatisme* dan *Progressivisme* menghendaki pendidikan diarahkan pada upaya yang bukan semata-mata memberikan pengetahuan teoritis, melainkan pada upaya pragmatis dan progresif

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat>

²² <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/philosophy>

²³ Muhammad Kristiawan, *Filsafat Pendidikan The Choice is Yours* (Yogyakarta: Penerbit Valia Pustaka, 2016.; Abdul Muis Thabrani, *Filsafat dalam Pendidikan* (Jember: IAIN Jember Press, 2015).

untuk melakukan berbagai kegiatan guna memecahkan masalah yang dihadapi. Sedangkan²⁴; dan (4) *Rekonstruksionisme* merupakan lanjutan gerakan *progresivisme* yang hampir sepaham dengan perenialisme yang menghendaki gerakan mengatasi krisis masyarakat modern. *Rekonstruksionisme* mencoba membina konsensus secara luas yaitu dengan mencari kesepakatan semua orang/rakyat mengenai tujuan inti pendidikan secara demokratis, bukan yang diatur atau dikuasai oleh golongan-golongan tertentu.²⁵

Bagaimana keempat cara berpikir filosofis tersebut diterapkan dalam proses akuntabilitas pendidikan berbentuk evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi di Indonesia? Para pihak yang berkepentingan seperti penyelenggara pendidikan, pimpinan pendidikan, dosen, mahasiswa, guru, siswa, pengawas, asesor, masyarakat pengguna dan pihak terkait lainnya berkomitmen untuk berpikir secara: (1) esensialis artinya berpikir keras dan cerdas pada pencapaian prestasi/mutu, bukan hanya prestise, dan berani mempertanggungjawabkannya saat dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; (2) perenialis artinya berpikir keras dan cerdas untuk kelanggengan/keberlanjutan institusi pada jangka panjang, bukan hanya pada perolehan hasil jangka pendek dan mampu mempertanggungjawabkannya saat dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; (3) pragmatis dan progresif artinya berpikir keras dan cerdas pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek sebagai modal pencapai/pengembangan berikutnya, dan berani mempertanggungjawabkannya saat dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; (4) rekonstruksionis artinya berpikir keras dan cerdas pada perbaikan kembali hal-hal yang masih di bawah SNP dan peningkatan hal-hal yang sudah melampauinya, dan berani mempertanggungjawabkannya saat dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pendidikan berbasis filsafat adalah pertanggungjawaban intelektual setiap orang kepada kaidah pemikiran logis akibat perbuatan edukasinya, yang mestinya dilakukan dengan cara berpikir esensial, perennial, pragmatis dan progresif, dan rekonstruksional.

Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Psikologi

Secara etimologis, kata 'psikologi' berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *Psychē* yang berarti jiwa dan *logia* yang berarti ilmu, sehingga berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa,²⁶ baik mengenai macam-macam gejala, proses maupun latar belakangnya,²⁷ sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *psychology* yang didefinisikan oleh *The Cambridge English Dictionary* dengan "*the scientific study of the way the human mind works and how it influences behaviour, or the influence of a particular person's character on their behaviour*".²⁸

²⁴ Saidah A.H., "Pemikiran Essensialisme, Eksistensialisme, Perenialisme, Dan Pragmatisme Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Al Asas* Vol. V No. 2, Oktober 2020.

²⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Rekonstruksionisme>

²⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi>

²⁷ Hamdanah, *Mengenal Psikologi dan Fase-Fase Perkembangan Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017: 1).

²⁸ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/psychology>

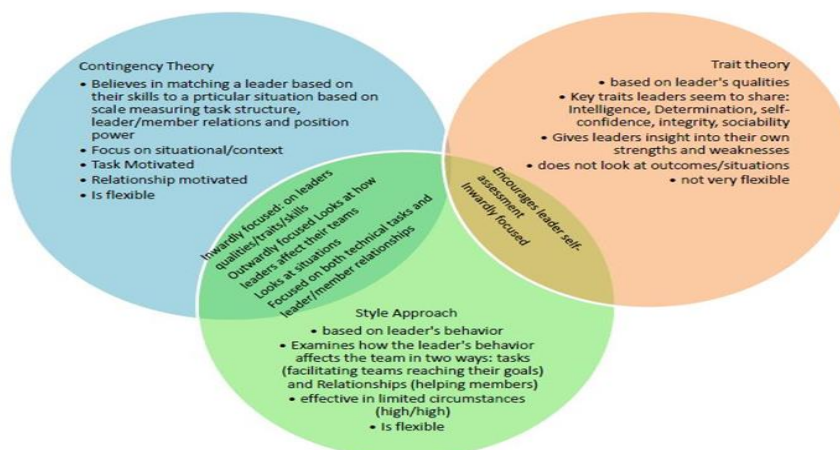
Merujuk pada definisi etimologis tersebut dimengerti bahwa akuntabilitas pendidikan berbasis psikologi adalah pertanggungjawaban proses pembuatan mendidik berpedoman pada ilmu jiwa, termasuk yang dihasilkan oleh para psikologi yang tepat dan sesuai.

Diantara aliran psikologi yang dapat dijadikan basis akuntabilitas pendidikan adalah *Trait-Behaviour-Contingency Model*: (1) *trait model* yang memusatkan perhatian emosionalnya pada model sifat dimana akuntabilitas pendidikan menjadi sifat alami yang melekat pada setiap individu dan kelompok; (2) *behavioral model* yang memusatkan perhatian emosionalnya pada model perilaku dimana akuntabilitas pendidikan menjadi perilaku alami yang membudaya pada setiap individu dan kelompok; dan (3) *contingency model* yang memusatkan perhatian emosionalnya pada model situasi lingkungan dimana akuntabilitas pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan masyarakat di sekelilingnya.²⁹

Mengingat akuntabilitas pendidikan merupakan tanggung jawab seorang pemimpin, maka tiga model tersebut erat kaitannya dengan sifat dan karakter pemimpin. Merujuk pada hasil penelitian Rebecca Jewett-Geragosian dari Granite State College, meskipun dengan istilah berbeda tetapi bermakna sama, sifat dan karakter pemimpin dalam akuntabilitas pendidikan dalam ketiga model adalah: (1) *trait model/trait theory*: berbasis kualitas pemimpin, pemimpin berbagi sifat kecerdasan, keputusan, percaya diri, integritas, dan sosial, pemimpin berbagi wawasan kekuatan dan kelemahan, pemimpin tidak memperhatikan dampak/situasi, pemimpin tidak luwes; (2) *behavioral model/style approach*: berbasis perilaku pemimpin, menelaah bagaimana perilaku pemimpin berpengaruh terhadap kelompok melalui dua cara yaitu orientasi tugas (memfasilitasi kelompok mencapai tujuan) dan orientasi relasi (menolong anggota), efektif dalam situasi yang terbatas; dan (3) *contingency model/ contingency theory*: percaya pada kelayakan pemimpin berbasis kemampuannya dalam situasi tertentu berbasis skala struktur tugas/pemimpin/relasi anggota dan posisi kekuasaan, fokus pada situasi/konteks, tugas termotivasi, relasi termotivasi, dan luwes,³⁰ sebagaimana gambar berikut.

²⁹ Encep Syaripudin, *Teori Kepemimpinan*, Jurnal Al Qalam, Vol. 21 No. 02 Th.2004, 459-477; <https://pascasarjana-ptiq.ac.id/news/read/3-psikologi-kepemimpinan>.

³⁰ <https://granite.pressbooks.pub/ld82o/chapter/7/>



Gambar 2. *Styles and Traits theory*. By Rebecca Jewett-Geragosian (2018)

Bagaimana ketiga basis psikologis tersebut dilaksanakan dalam proses akuntabilitas pendidikan berbentuk evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi di Indonesia? Para pihak yang berkepentingan seperti penyelenggara pendidikan, pimpinan pendidikan, dosen, mahasiswa, guru, siswa, pengawas, asesor, masyarakat pengguna dan pihak terkait lainnya sama-sama memiliki mental/emosi: (1) *trait model* artinya menjadi *roal model* (teladan) pribadi yang memiliki sifat jujur dan transparan serta selalu siap sedia kapanpun bila dievaluasi, diakreditasi, dan disertifikasi; (2) *behavioral model* artinya menjadi *roal model* (teladan) pribadi yang mau menanggung segala resiko saat dievaluasi, diakreditasi, dan disertifikasi; (3) *contingency model* artinya menjadi *roal model* (teladan) pribadi yang mampu menanggung beban situasi masyarakat yang diwakilinya serta selalu siap sedia kapanpun bila dievaluasi, diakreditasi, dan disertifikasi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pendidikan berbasis psikologi adalah pertanggungjawaban emosional setiap orang kepada rasa kemanusiaan akibat perbuatan edukasinya, yang mestinya dilakukan dengan cara mempertimbangkan aspek sifat, perilaku, dan situasi yang tepat di sekelilingnya.

Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Sosiologi

Secara etimologis, kata ‘sosiologi’ diperoleh dari dua kata dalam bahasa Latin yaitu *Socius* yang berarti kawan atau sosial dan *Logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga diartikan dengan ilmu sosial. Dalam bahasa Inggris, psikologi disebut *sociology* yang dalam *The Cambridge English Dictionary* dimaknai dengan “*the study of the relationships between people living in groups, especially in industrial societies*”.³¹

Mengacu pada pengertian tersebut, akuntabilitas pendidikan berbasis psikologi berarti pertanggungjawaban proses perbuatan mendidik berdasarkan ilmu sosial, termasuk produk pemikiran para ahli sosiologi yang tepat dan sesuai.

³¹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sociology>

Salah satu aliran sosiologi yang dapat dijadikan basis akuntabilitas pendidikan adalah *Fungsionalisme Struktural* dengan tokohnya Emile Durkheim dan Talcott Parsons yang gagasan intinya adalah sistem sosial ibarat organ tubuh. Akuntabilitas pendidikan dipandang sebagai tututan dari hierarki stratifikasi sosial. Akuntabilitas pendidikan bekerja dalam sebuah sistem yang terstratifikasi dan semuanya berfungsi sesuai kebutuhan sistem sosial. Singkatnya, Akuntabilitas pendidikan merupakan kebutuhan dari sebuah sistem stratifikasi sosial, bukan tentang seseorang yang menempati 'jabatan' tertentu, tapi tentang posisi sosial dalam sebuah sistem. Setiap posisi diilustrasikan seperti organ tubuh, maka ada jantung, hati, ginjal, dan sebagainya. Semua organ bekerja memenuhi kebutuhan fungsional bagi tubuh. Apabila salah satu posisi sosial tidak berfungsi, maka sistem sosial akan kacau, masyarakat mengalami disorganisasi.³²

Menurut aliran sosiologi *Fungsionalisme Struktural*, ada tiga bentuk stratifikasi sosial dimana akuntabilitas pendidikan ditujukan, yaitu: (1) stratifikasi politik, yaitu anggota masyarakat berdasarkan tingkat kekuasaan yang dimilikinya, yang meliputi tipe kasta, oligarki, dan demokratis. Stratifikasi politik ini terdiri dari sekelompok elit penguasa yang sedikit jumlahnya. Para penguasa ini beserta para anggotanya memiliki wewenang sangat besar untuk mengatur gerak masyarakat. Biasanya, sifat kelas penguasa seperti ini terjadi pada sistem masyarakat yang hidup dalam pemerintahan feodal dan otoriter, tetapi dalam pemerintahan demokratis pun masih terjadi terutama dalam lembaga-lembaga birokrasi pemerintahan dan lembaga swasta lainnya yang menganut hirarki organisasi. Intinya, kehormatan seseorang diukur dari seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya; (2) stratifikasi ekonomi, yaitu anggota masyarakat berdasarkan pemilikan materi, yang meliputi kelas atas (hidup berlebihan), menengah (hidup berkecukupan), dan bawah (hidup kekurangan/miskin). Dalam stratifikasi ekonomi ini, lapisan teratas biasanya ditempati oleh Individu/ kelompok yang mampu memperoleh kekayaan ekonomi dalam jumlah besar, sebaliknya lapisan kebawahnya ditempati oleh mereka yang tidak berhasil dalam mengumpulkan jumlah kekayaan ekonomi. Intinya, kehormatan seseorang diukur dari seberapa besar kekayaan yang dimilikinya; dan (3) stratifikasi status sosial, yaitu anggota masyarakat berdasarkan kehormatan, yang meliputi gelar kebangsawanan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan (sangat tinggi seperti doktor dan profesor, tinggi seperti sarjana dan mahasiswa, menengah seperti SMA, rendah seperti SD dan SMP, dan buta huruf). Menurut sosiolog ternama Max Weber, dalam stratifikasi status sosial ini, seseorang dapat memainkan beberapa pola interaksi sosial yang membuatnya memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila seorang individu/ kelompok memiliki lebih dari satu kedudukan (status sosial) dalam kehidupan masyarakatnya yang membuatnya semakin terhormat dan disegani. Intinya, kehormatan seseorang diukur dari seberapa besar gelar kebangsawanan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan yang dimilikinya

33

³² <https://fis.unj.ac.id/labs/sosiologi/teori-utama-sosiologi/>

³³<https://www.materibelajar.id/2019/01/macam-macam-stratifikasi-sosial.html>;
<https://materiips.com/bentuk-bentuk-stratifikasi-sosial>

Bagaimana basis sosiologi *Fungsionalisme Struktural* dengan tiga stratifikasi sosialnya tersebut diterapkan dalam proses akuntabilitas pendidikan berbentuk evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi di Indonesia? Para pihak yang berkepentingan seperti penyelenggara pendidikan, pimpinan pendidikan, dosen, mahasiswa, guru, siswa, pengawas, asesor, masyarakat pengguna dan pihak terkait lainnya mengakomodasi dan memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan stratifikasi sosialnya: (1) kepada stratifikasi politik yang memiliki kekuasaan dapat dimintai perlindungannya, masukan sarannya, dan kerjasamanya yang saling menguntungkan terkait program-program pemerintah dan lembaga pendidikan seperti partisipasi mahasiswa/dosen dalam pemberdayaan masyarakat desa, kemudian sanggup mempertanggungjawabkannya ketika dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; (2) kepada stratifikasi ekonomi yang memiliki materi berlebih dapat dimintai bantuannya, pendapatnya, dan kerjasamanya untuk program magang, penyaluran lulusan, atau pembiayaan pendidikan seperti beasiswa siswa/mahasiswa berprestasi/kurang mampu, kemudian sanggup mempertanggungjawabkannya ketika dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; (3) kepada stratifikasi status sosial yang memiliki status kehormatan bangsawan dan pendidikan dapat dimintai kontribusi sumber dayanya untuk berperan serta aktif memajukan lembaga pendidikan, baik sebagai pendidik/tenaga pendidik atau peserta didik, kemudian sanggup mempertanggungjawabkannya ketika dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Dari paparan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pendidikan berbasis sosiologi adalah pertanggungjawaban sosial setiap orang kepada posisi masyarakat akibat perbuatannya, yang mestinya dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan fungsional masyarakat, baik stratifikasi politik, ekonomi maupun status sosial.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pendidikan: (1) berbasis agama adalah pertanggungjawaban spiritual kepada Tuhan akibat suatu perbuatan edukasi, yang mestinya dilakukan secara adil, *ihsan*, memuaskan, tidak curang, tidak melanggar aturan, dan tidak bertentangan; (2) berbasis filsafat adalah pertanggungjawaban intelektual kepada kaidah pemikiran logis akibat suatu perbuatan edukasi, yang mestinya dilakukan dengan cara berpikir esensial, perennial, pragmatis dan progresif, dan rekonstruksional; (3) berbasis psikologi adalah pertanggungjawaban emosional kepada rasa kemanusiaan akibat suatu perbuatan edukasi, yang mestinya dilakukan dengan cara mempertimbangkan aspek sifat, perilaku, dan situasi yang tepat di sekelilingnya; dan (4) berbasis sosiologi adalah pertanggungjawaban sosial kepada posisi masyarakat akibat suatu perbuatan edukasi, yang mestinya dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan fungsional masyarakat, baik stratifikasi politik, ekonomi maupun status sosial.

Dari hasil penelitian ini disarankan kepada para pemangku kepentingan pendidikan seperti pemegang kebijakan pendidikan, praktisi pendidikan, dan peneliti pendidikan lainnya, hendaknya menyandarkan konsep akuntabilitas pendidikan pada

landasan yang kokoh dan relevan dalam agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi sehingga semua pihak yang berpekerjaan mau dan mampu melaksanakannya dengan penuh kesadaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H., Saidah, "Pemikiran Essensialisme, Eksistensialisme, Perennialisme, Dan Pragmatisme Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Al Asas* Vol. V No. 2, Oktober 2020.
- Al Mighwar, Muhammad, "The Leadership of K.H. Imam Zarkasyi in Managing of Boarding School Darussalam Gontor", *IJO - International Journal Of Educational Research*, Volume 4| Issue 03| March | 2021: 16. Tersedia online: <http://www.ijojournals.com/index.php/er/article/view/450>
- Al Mighwar, Muhammad, "Penyusunan Dan Penyesuaian Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)", *Jurnal Al Afkar*, Vol. 4, No. 1, Februari 2021: 33-34. Tersedia online: https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/157
- Fasli, Jalal dan Supriyadi, Dedi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita, 2001: 35).
- Hamdanah, *Mengenal Psikologi dan Fase-Fase Perkembangan Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017: 1).
- Kauzes, J.M. dan Posner, B.Z., *The Leadership Challenge*. San Francisco: Jossey-Bass Publishing, 2010).
- Kristiawan, Muhammad, *Filsafat Pendidikan The Choice is Yours* (Yogyakarta: Penerbit Valia Pustaka, 2016)
- Lembaga Adiministrasi Negara, *Perencanaan Strategic Instansi Pemerintah* (Jakarta, Lembaga Adiministrasi Negara, 2000: 21-23).
- Miles, B.B. dan Huberman, A.M., *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: UI Press, 1992: 17)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2002: 198).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984: 265)
- Murata, Sachiko dan C. Chittick, William, *Trilogi Islam: Islam, Iman, dan Ihsan*, terjemah Ghufroon A, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997: 294)
- Syaripudin, Encep, *Teori Kepemimpinan*, *Jurnal Al Qalam*, Vol. 21 No. 02 Th.2004, 459-477. Tersedia online: <https://pascasarjana-ptiq.ac.id/news/read/3-psikologi-kepemimpinan>.
- Thabrani, Abdul Muis, *Filsafat dalam Pendidikan*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015).